



Pemaksanaan Pembahasan RUU Cipta Kerja Dalam Pusaran Disfungsi CSO

Dr. Busyro Muqoddas
Pimpinan Pusat Muhammadiyah

PRODUK PEMILU

Bagaimana Kondisi CSO Indonesia Saat Ini?



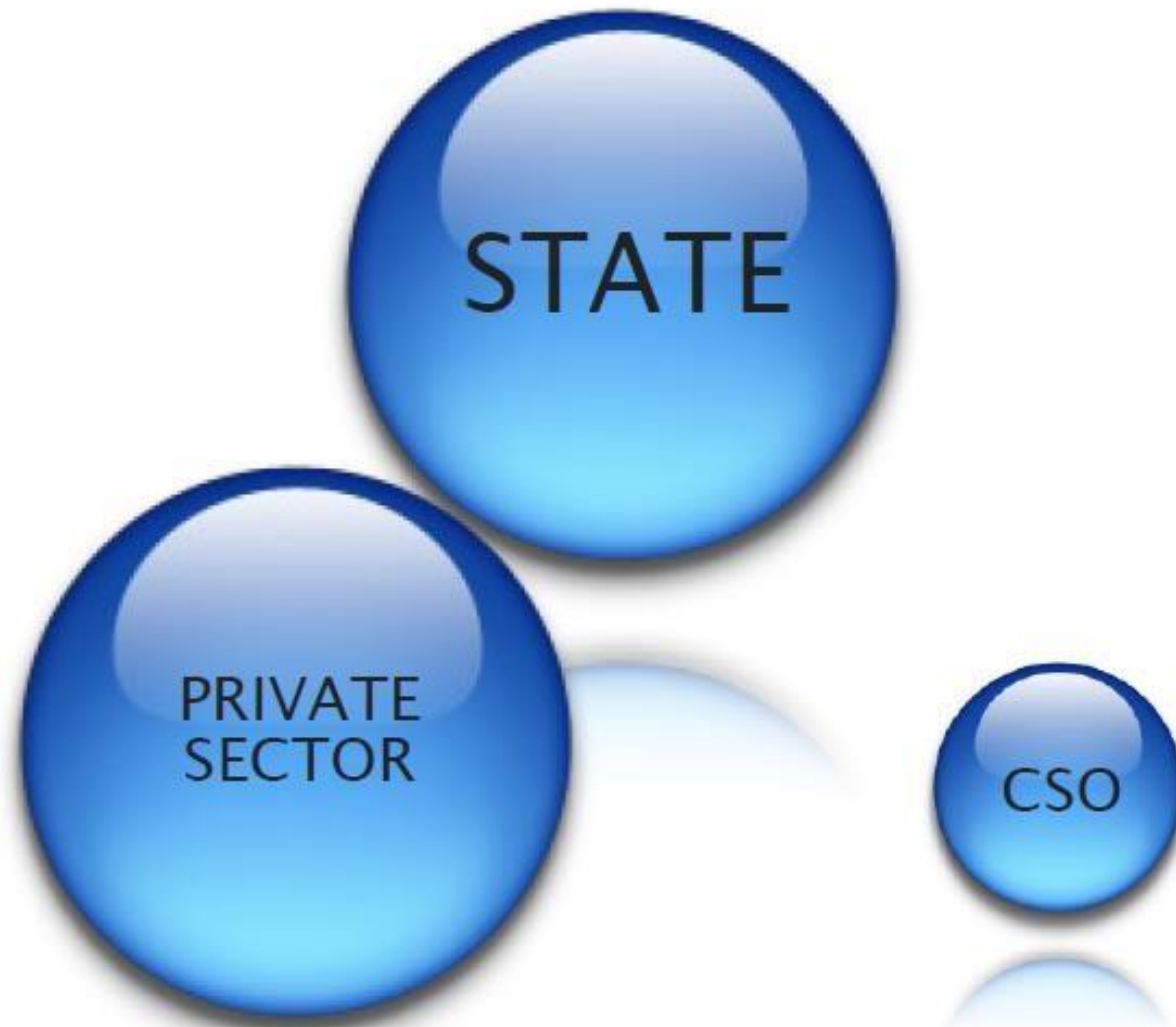
CSO Sustainability Index 2014

*Dibuat oleh Management Systems International (MSI)
bekerjasama dengan Konsil LSM Indonesia dengan dukungan dari USAID*

Skor:

- 1 - 3 : Keberlanjutan Meningkat (*Enhanced*)
- 3,1 - 5 : Keberlanjutan Berkembang (*Evolving*)
- 5,1 - 7 : Keberlanjutan Terhambat (*Impeded*)

Segitiga Timpang



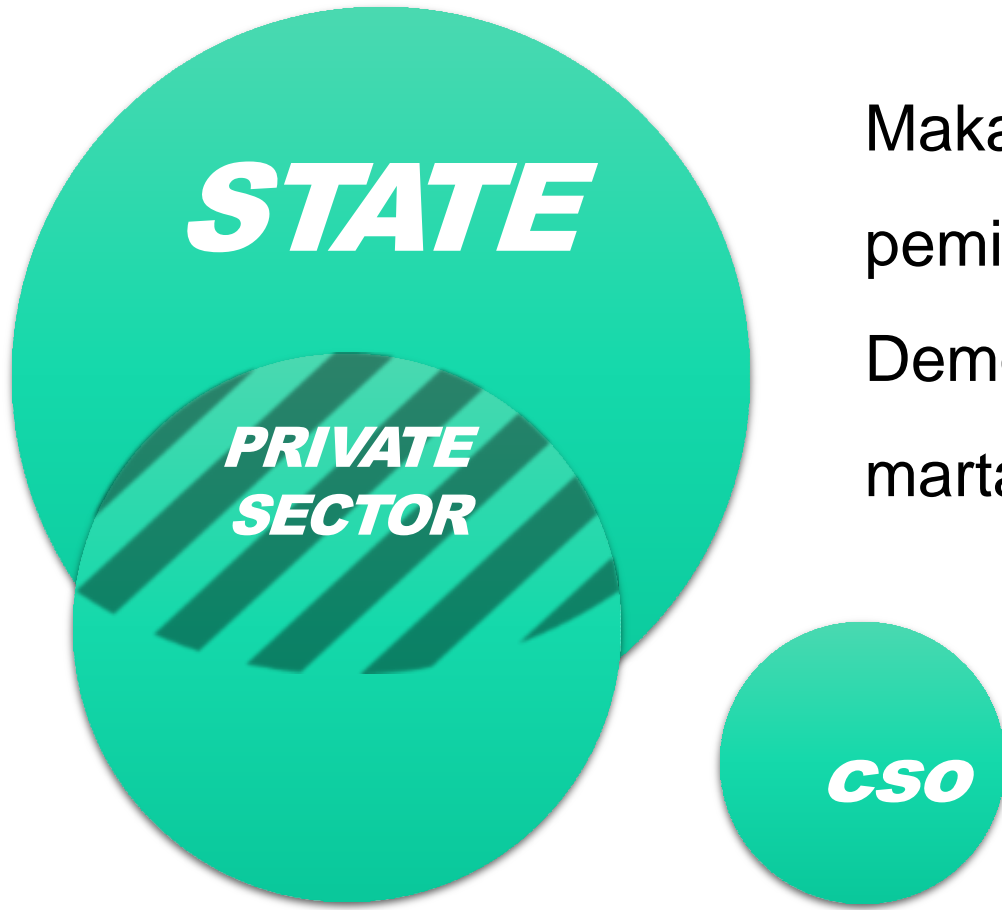


Politik Legislasi Anti Demokrasi

- A UUMD 3 No. 17 th 2014.
- B UU Ormas No. 2 th 2017.
- C Penerapan UU ITE
Ancaman kebebasan berdemokrasi.
- D UU Pemilu no. 7 th 2018 khususnya pasal 222.
- E UU Kejahatan Terorisme No 5 th 2018.
- F Praktek suap dalam sektor Birokrasi.
- G Pengesahan UU KPK dan UU Minerba
- H Pemaksaan RUU Cipta Kerja

Marginalisasi terhadap CSO sebagai pilar Demokrasi:

Maka, Pemilu jujur dan bersih dari suap terhadap pemilih Adalah pemilu yang bisa menegakkan Demokrasi Ekonomi, Hukum. HAM dan menjaga martabat CSO.



DATA SEBARAN KORUPSI SELURUH NKRI Tahun 2004-2019



Kesimpulan Kajian Omnibus Law-PP Muhammadiyah

NU-MUHAMMADIYAH

TOLAK OMNIBUS LAW

Organisasi keagamaan
besar nyatakan tolak
Omnibus Law



NAHDLATUL ULAMA

*Tidak beri makan saja tidak boleh,
nah ini cenderung memotong
kesempatan orang cari makan"*

M. Maksu Machfoedz,
Waketum PBNU

- ▲ Sebut sarat dengan keadilan
- ▲ Persoalkan ketentuan impor pangan
- ▲ Dinilai pro-investor besar

MUHAMMADIYAH

*Sebaiknya, pemerintah
dengan jiwa besar menarik
kembali naskah itu"*

Busyro Muqqodas, Ketua
PP Muhammadiyah

- ▲ Nilai hak masyarakat terampas
- ▲ Sebut ada pelemahan demokrasi
- ▲ Anggap banyak stakeholder tak dilibatkan

1. Proses perumusan RUU Cipta Kerja sebagai inisiatif pemerintah, telah ditunjukkan dengan berbagai langkah yang tidak mencerminkan tata krama dan etika demokrasi yang menjunjung tinggi prinsip musyawarah sebagai amanat Pancasila.
2. Demokrasi yang menuntut jiwa besar dalam bentuk memberikan peluang sebesar-besarnya terhadap elemen masyarakat sipil, seharusnya ditempuh dengan sikap politik yang mencerminkan kejujuran, keterbukaan, kesetaraan dan dialogis oleh Pemerintah bersama DPR dalam seluruh proses politik.
3. substansi RUU Cipta Kerja secara fundamental bertentangan dengan Jiwa dan Nilai-nilai Dasar Pembukaan UUD Th 1945. Bahkan, tidak mencerminkan kepekaan dan keberpihakan terhadap realitas kesenjangan ekonomi dan politik sebagai dampak dari ketidak-adilan sosial. Tidak pula memberikan perlindungan politik dan hukum bagi rakyat yang berdaulat atas kehidupan yang layak (UUD Th 1945, Pasal 27:ayat 2), perlindungan HAM (UUD Th 1945 Pasal 28) dan kehidupan perekonomian berjiwa kerakyatan (UUD th 1945, Pasal 33: ayat 3-4).

Sumber: CNN Indonesia, Detik, SindoNews - K12

pinterpolitik.com | pinterpolitikdotcom | pinterpolitik | pinterpolitik



Rekomendasi...

1. Menunda pembahasan RUU tersebut dalam masa sidang DPR, terutama dalam situasi keprihatian bangsa sebagai dampak serius multidimensional dari Covid-19.
2. Muhammadiyah menyatakan menolak dengan tegas keseluruhan substansi RUU tersebut karena bertentangan dengan jiwa dan nilai-nilai dasar Moralitas Konsitusi Negara Republik Indonesia.
3. pemerintah menarik keseluruhan draf RUU Cipta Kerja. Dan sekiranya pemerintah hendak meningkatkan komitmennya pada ikhtiar peningkatan perekonomian negara, hendaknya ditempuh dengan penuh seksama dalam bentuk kajian etis-akademis yang didasarkan pada sikap konsisten terhadap Moralitas Konstitusi Republik Indonesia .

